

# Buku Antiterorisme di Era Revolusi Industri 4.0

written by Hamidulloh Ibda

Tantangan era Revolusi Industri 4.0 bukan sekadar urusan data, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun juga ketahanan bangsa dari terorisme. Sebabnya, anak-anak kini secara terang-terangan dilibatkan dalam aksi terorisme.

Selain peran orang tua, penguatan literasi toleransi dan bahan bacaan antiterorisme untuk anak-anak sangat dibutuhkan. Tantangan untuk menjawab abad 21 memang kompleks. Pertama, masyarakat mulai meninggalkan budaya teks. Kedua, penyebaran paham terorisme tersistem yang masuk ke dalam keluarga dan sekolah. Ketiga, minimnya sumber literatur antiterorisme, toleran, dan memuat karakter sesuai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai Perpres Nomor 87 tahun 2017.

Di Depok, tahun 2016 ditemukan buku “Anak Islam Suka Membaca” bermuatan radikalisme. Buku terbitan Pustaka Amanah itu dicetak pertama kali tahun 1999 dan sampai 2016 sudah cetakan ke 167 (Kompas.com, 21/1/2016). Sampai 2018, bahan bacaan anak-anak tak sekadar buku, melainkan apa saja yang diakses dari gawai.

Budaya literasi teks (membaca, menulis, arsip) di era 21 bergeser cepat. Perkembangan media siber di media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*) dan layanan pesan (*WhatsApp, Line, Blackberry Messenger*) menjadikan masyarakat instan mendapatkan informasi atau pengetahuan.

Berkembangnya video, meme, yang mudah disebar cepat melalui medsos dan layanan pesan membuat anak-anak bisa teracuni jika kontennya radikal. Akurasi, validitas data dan informasi melalui kanal ini justru membahayakan jika tak dikawal. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan serius pemerintah, lembaga pendidikan, pegiat literasi, penerbit buku, dan orang tua.

Perkembangan dunia literasi begitu pesat menjadikan literasi lama (membaca, menulis, berhitung) diganti literasi baru (data, teknologi, SDM). Literasi baru ini dikuatkan guna menjawab era Revolusi Industri 4.0. Tantangannya, tak hanya pada media literasinya, melainkan konten untuk membangun generasi

antiterorisme.

## **Buku Antiterorisme**

Buku antiterorisme urgen dibutuhkan, baik segi kuantitas maupun kualitas. Sebabnya, perkembangan paham terorisme, jihad sesat, khilafah, dan antinasionalisme berkembang cepat. Wahid Foundation tahun 2016 menyebut ada 60% dari 1.626 responden aktivis rohis setuju berjihad di wilayah konflik. Bahkan, 68% setuju berjihad di masa mendatang (Media Indonesia, 15/5/2018).

Mata Air Foundation dan Alvara Research Center tahun 2017 merilis data 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad mendirikan khilafah dan mengganti dasar negara. Sementara Badan Intelijen Negara (BIN) merilis 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar paham radikal (Antaraneews.com, 28/4/2018).

Data ini menjadi cambuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku literasi untuk menguatkan buku antiterorisme. Meski pembelajaran di sekolah berbasis *e-learning* dan *e-book*, namun buku cetak tetap penting untuk memenuhi bahan baca generasi muda.

Dari segi konten, ada beberapa segmen perlu dikuatkan dan direvolusi. Pertama, materi buku harus berisi pengertian, macam, modus, cara mencegah dan melawan terorisme. Materi ini penting. Jangan sampai kita melarang menjauhi terorisme, namun anak-anak tak dikenalkan literasi antiterorisme.

Kedua, peneguhan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai pilar bangsa. Cakupannya luas, bisa pada media, strategi, dan materi dalam buku mata pelajaran. Muatan ini menguatkan *fikrah* (pemikiran), *akidah* (keyakinan) ramah, toleran, religius, dan nasionalis. Sebabnya, doktrin jihad megebom menjadi alat cuci otak kaum teroris yang harus diputus.

Ketiga, penguatan materi keagamaan ramah dengan membuang jauh paham *takfiri* (mengafirkan), *tabdi'* (membidahkan) dan *tasyri'* (menyirikkan). Hal itu mencakup *harakah* (gerakan) dan *amaliyah* (amalan) agama dengan menjunjung tinggi perdamaian.

Keempat, muatan materi buku harus berisi 17 karakter dalam PPK. Mulai dari karakter religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Kemdikbud dan Kemristek Dikti harus mendukung dengan kurikulum antiterorisme. Selain kurikulum, tim penyusun buku, guru/dosen harus paham tentang muatan materi berorientasi pada *High Order Thinking Skill (HOTS)* atau kemampuan berpikir tinggi. Capaian pembelajarannya harus menuju penguatan karakter aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan).

### **Solusi Alternatif**

Sejak 2018, Kemristek Dikti dan Kemdikbud berusaha menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai solusi. Salah satunya, model “literasi lama” diganti “literasi baru”. Istilah Revolusi Industri 4.0 dikenalkan Klaus Martin Schwab dalam buku *The Fourth Industrial Revolution* (2017). Klaus berpendapat saat ini kita berada di awal revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup.

Jika bahan bacaan yang ada bermuatan ajaran radikal tentu mengancam bangsa. Apalagi, pola penyebaran faham mereka sudah menguasai media siber dan media sosial. Harus ada formula dan revolusi untuk menguatkan buku antiterorisme.

Pertama, produksi massal buku-buku antiterorisme, bermuatan toleransi dan cinta damai sesuai kemampuan berpikir tinggi abad 21. Kemdikbud, Kemristek Dikti bisa menggandeng penulis, peneliti, penerbit, percetakan untuk memperkuat kuantitas dan kualitas buku-buku tersebut.

Kedua, buku antiterorisme tak cukup jika mata pelajaran. Namun diperlebar pada bahan bacaan bunga rampai, novel, cerpen, dan komik bermuatan antiterorisme dengan animasi, gambar, serta karikatur menarik.

Ketiga, Perpustnas mewajibkan semua penerbit menerbitkan buku antiterorisme tiap tahun. Minimal, satu penerbit satu sampai lima buku. Sampai Januari 2018, ada 1.317 anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Mereka memproduksi lebih 30.000 judul buku tiap tahun, dan ini secara kuantitas masih tergolong rendah. Jika mereka menerbitkan lima buku tiap tahun, maka dari 1.317 penerbit bisa mencetak 6.585 buku antiterorisme.

Keempat, produksi buku tak hanya cetak, namun dibuat *e-book*, dan dimasukkan aplikasi di *Play Store* agar bisa diakses semua khalayak. Kelima, Perpustakaan harus ketat memberikan Katalog Dalam Terbitan (KDT), ISBN, dan barcode pada penerbit. Jangan asal lolos syarat administrasi, namun konten dan cakupan materi jika berisi terorisme harus ditolak bahkan diberi sanksi.

Menumpas terorisme harus digerakkan secepatnya. Ikhtiar ini menjadi rencana masa depan membangun generasi muda nasionalis dan antiterorisme. Buku antiterorisme bukan segalanya, namun pemberantasan terorisme bisa berawal dari sana!